



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

10. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 477);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah

pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang akan dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat PD Provinsi adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang perdagangan di daerah provinsi.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Menteri ini untuk memberikan arah kebijakan Pemerintah di bidang perdagangan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi di bidang perdagangan di daerah.

BAB II

LINGKUP URUSAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Menteri kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Dekonsentrasi.

- (2) Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan perdagangan dalam negeri di daerah; dan
 - b. pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri di daerah.

Pasal 4

- (1) Pemerintah mengalokasikan anggaran sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Alokasi anggaran urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk dilakukan revisi oleh PD Provinsi.

Pasal 5

Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai rincian alokasi anggaran Dana Dekonstrasi bidang perdagangan tahun anggaran 2022 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 6

- (1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada 34 (tiga puluh empat) gubernur.
- (2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

- (3) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 7

- (1) Gubernur menetapkan PD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan sebagai pengelola keuangan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas:
 - a. kuasa pengguna anggaran/barang yang dijabat oleh Kepala PD Provinsi;
 - b. pejabat pembuat komitmen;
 - c. pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar; dan
 - d. pejabat akuntansi dan bendahara pengeluaran.
- (3) Gubernur menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui direktur jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perbendaharaan.
- (4) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan koordinasi dengan Menteri mengenai:
 - a. pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi; dan
 - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan teknis di daerah yang dilakukan oleh PD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

- (2) Gubernur dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. direktur jenderal perdagangan dalam negeri;
 - b. direktur jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga;
 - c. direktur jenderal perdagangan luar negeri;
 - d. direktur jenderal perundingan perdagangan internasional;
 - e. direktur jenderal pengembangan ekspor nasional;
 - f. kepala badan pengawas perdagangan berjangka komoditi; dan
 - g. inspektur jenderal.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi di bidang perdagangan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. fasilitasi;
 - c. pelatihan;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. pemantauan; dan
 - f. evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. sekretaris jenderal;

- b. direktur jenderal perdagangan dalam negeri;
 - c. direktur jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga;
 - d. direktur jenderal perdagangan luar negeri;
 - e. direktur jenderal perundingan perdagangan internasional;
 - f. direktur jenderal pengembangan ekspor nasional; dan
 - g. kepala badan pengawas perdagangan berjangka komoditi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi, dan pemeriksaan atas laporan keuangan Dana Dekonsentrasi.
- (5) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Unit Pimpinan Tinggi Madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan.

BAB V

PENARIKAN KEMBALI PELIMPAHAN

Pasal 11

- (1) Menteri dapat menarik kembali urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada gubernur, jika:
- a. Menteri mengubah kebijakan;
 - b. gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. gubernur mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada gubernur.

- (2) Penarikan kembali urusan pemerintahan bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (3) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan Dana Dekonsentrasi.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) PD Provinsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penghentian alokasi pendanaan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), PD Provinsi dikenai sanksi administratif berupa penghentian alokasi pendanaan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (3) Sanksi administratif penghentian alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2021

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1261

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


SRI HARIYATI

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
1	GUBERNUR ACEH	ACEH	1,424,464,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DI DAERAH	942,506,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	146,220,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	98,262,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	135,992,000
		5 PENGGUNA PASAR LELANG YANG BERPARTISIPASI	323,500,000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	44,748,000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	133,784,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DI DAERAH	481,958,000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	116,982,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		2 LAYANAN PERKANTORAN	142,196,000
2	GUBERNUR SUMATERA UTARA	3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	102,780,000
		4 FASILITASI PENGEMBANGAN PROMOSI DAN KOORDINASI DI KAWASAN PERBATASAN	120,000,000
		SUMATERA UTARA	1,439,125,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DI DAERAH	1,100,323,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	262,530,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	94,909,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	133,662,000
		5 PENGGUNA PASAR LELANG YANG BERPARTISIPASI	318,500,000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	31,466,000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	199,256,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DI DAERAH	338,802,000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	92,518,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	145,548,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	100,736,000
		SUMATERA BARAT	1,194,710,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DI DAERAH	853,580,000
3	GUBERNUR SUMATERA BARAT	1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	232,530,000
4	GUBERNUR RIAU	3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	89,242,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	127,774,000
		5 PENGGUNA PASAR LELANG YANG BERPARTISIPASI	148,000,000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	28,712,000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	167,322,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	341,130,000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	92,555,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	148,929,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	99,646,000
		RIAU	1,209,863,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	873,293,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	186,620,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	88,712,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	126,878,000
		5 PENGGUNA PASAR LELANG YANG BERPARTISIPASI	202,000,000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	28,200,000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	180,883,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	336,570,000
5	GUBERNUR JAMBI	1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	92,616,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	146,730,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	97,224,000
		JAMBI	1,316,074,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	969,295,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	147,220,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	85,866,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	123,728,000
		5 PENGGUNA PASAR LELANG YANG BERPARTISIPASI	293,000,000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	35,031,000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	224,450,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	346,779,000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	114,709,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	135,556,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	96,514,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
6	GUBERNUR SUMATERA SELATAN	SUMATERA SELATAN	999,172,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	662,063,000
7	GUBERNUR BENGKULU	1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	190,620,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	83,919,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	122,118,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	36,749,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	168,657,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	337,109,000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	111,517,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	131,878,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	93,714,000
		BENGKULU	1,045,057,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	701,398,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	147,220,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	86,004,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	124,323,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	34,842,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	249,009,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	343,659,000
8	GUBERNUR LAMPUNG	1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	108,187,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	140,588,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	94,884,000
		LAMPUNG	1,135,667,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	809,243,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	170,420,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	80,337,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	117,869,000
		5 PENGGUNA PASAR LELANG YANG BERPARTISIPASI	192,500,000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	30,931,000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	157,186,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	326,424,000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	104,392,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	130,836,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	91,196,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
9	GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	945,104,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	619,013,000
10	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU	1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	147,220,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	82,906,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	120,683,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	32,483,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	175,721,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	326,091,000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	99,352,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	133,995,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	92,744,000
		KEPULAUAN RIAU	1,160,375,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	591,690,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	146,220,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	88,055,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	126,584,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	6,510,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	164,321,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	568,685,000
11	GUBERNUR DKI JAKARTA	1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	136,035,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	144,635,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	196,972,000
		4 FASILITASI PENGEMBANGAN PROMOSI DAN KOORDINASI DI KAWASAN PERBATASAN	91,043,000
		DKI JAKARTA	750,178,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	453,898,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	100,000,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	68,356,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	87,924,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	2,836,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	134,782,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	296,280,000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	96,486,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	126,520,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	73,274,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
12	GUBERNUR JAWA BARAT	JAWA BARAT	1,091,101,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	794,117,000
13	GUBERNUR JAWA TENGAH	1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	205,820,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	71,236,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	101,866,000
		5 PENGGUNA PASAR LELANG YANG BERPARTISIPASI	134,000,000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	69,578,000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	151,617,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	296,984,000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	87,314,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	122,824,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	86,846,000
		JAWA TENGAH	1,154,775,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	836,195,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	205,820,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	83,627,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	120,774,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		5 PENGGUNA PASAR LELANG YANG BERPARTISIPASI	139,000,000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	68,840,000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	158,134,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	318,580,000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	103,078,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	126,480,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	89,022,000
14	GUBERNUR D.I. YOGYAKARTA	D.I. YOGYAKARTA	969,001,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	626,218,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	193,750,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	83,804,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	114,848,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	5,852,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	167,964,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	342,783,000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	100,632,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	151,197,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	90,954,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
15	GUBERNUR JAWA TIMUR	JAWA TIMUR	1,084,988,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	752,873,000
16	GUBERNUR BANTEN	1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	205,820,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	87,560,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	125,884,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	60,630,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	212,979,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	332,115,000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	81,243,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	157,806,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	93,066,000
		BANTEN	1,128,116,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	835,235,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	147,220,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	67,204,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	103,202,000
		5 PENGGUNA PASAR LELANG YANG BERPARTISIPASI	288,500,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	24,452,000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	144,657,000
17	GUBERNUR BALI	PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	292,881,000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	88,059,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	120,952,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	83,870,000
		BALI	1,568,528,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,030,018,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	197,420,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	90,036,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	131,046,000
		5 PENGGUNA PASAR LELANG YANG BERPARTISIPASI	266,500,000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	39,444,000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	245,572,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	538,510,000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	123,543,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	139,668,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	97,808,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		4 FASILITASI PENGEMBANGAN PROMOSI DI KAWASAN PARIWISATA	177,491,000
18	GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT	1,382,097,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,003,438,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	170,420,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	90,866,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	130,294,000
		5 PENGGUNA PASAR LELANG YANG BERPARTISIPASI	266,500,000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	7,040,000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	278,318,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	378,659,000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	121,247,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	159,176,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	98,236,000
19	GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	1,245,173,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	699,314,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	170,420,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	100,969,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	141,529,000
20	GUBERNUR KALIMANTAN BARAT	5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	45,624,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	180,772,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	545,859,000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	113,023,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	163,660,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	105,996,000
		4 FASILITASI PENGEMBANGAN PROMOSI DAN KOORDINASI DI KAWASAN PERBATASAN	163,180,000
		KALIMANTAN BARAT	1,230,164,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	631,691,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	217,820,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	86,102,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	118,807,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	36,088,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	112,874,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	598,473,000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	95,238,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		2 LAYANAN PERKANTORAN	167,435,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	95,732,000
		4 FASILITASI PENGEMBANGAN PROMOSI DAN KOORDINASI DI KAWASAN PERBATASAN	240,068,000
21	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN TENGAH	1,007,621,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	670,448,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,412,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	132,960,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	87,755,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	139,740,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	37,326,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	212,255,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	337,173,000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	110,725,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	130,246,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	96,202,000
22	GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN SELATAN	1,096,584,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	712,616,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
23	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR	2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	170,420,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	88,781,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	127,515,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	38,210,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	227,690,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	383,968,000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	112,020,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	175,210,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	96,738,000
		KALIMANTAN TIMUR	1,120,147,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	755,323,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	163,420,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	95,879,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	137,329,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	46,420,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	252,275,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	364,824,000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	108,902,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		2 LAYANAN PERKANTORAN	153,396,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	102,526,000
24	GUBERNUR KALIMANTAN UTARA	KALIMANTAN UTARA	1,143,381,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	648,248,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	108,420,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	87,836,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	155,578,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	8,114,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	228,300,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	495,133,000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	119,406,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	184,196,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	110,550,000
		4 FASILITASI PENGEMBANGAN PROMOSI DAN KOORDINASI DI KAWASAN PERBATASAN	80,981,000
25	GUBERNUR SULAWESI UTARA	SULAWESI UTARA	1,637,687,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,073,969,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA	177,220,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
26	GUBERNUR SULAWESI TENGAH	3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	100,162,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	140,222,000
		5 PENGGUNA PASAR LELANG YANG BERPARTISIPASI	366,500,000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	46,919,000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	182,946,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	563,718,000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	126,062,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	154,816,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	105,640,000
		4 FASILITASI PENGEMBANGAN PROMOSI DI KAWASAN PARIWISATA	177,200,000
		SULAWESI TENGAH	1,076,825,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	685,375,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	170,420,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	87,226,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	142,551,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	37,156,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	188,022,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	391,450,000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	123,074,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	163,136,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	105,240,000
27	GUBERNUR SULAWESI SELATAN	SULAWESI SELATAN	1,049,397,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	671,084,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	167,420,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	92,755,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	133,283,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	40,807,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	176,819,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	378,313,000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	105,741,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	172,208,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	100,364,000
28	GUBERNUR SULAWESI TENGGARA	SULAWESI TENGGARA	1,312,907,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	940,458,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	167,420,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	98,815,000
29	GUBERNUR GORONTALO	4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	136,118,000
		5 PENGGUNA PASAR LELANG YANG BERPARTISIPASI	261,500,000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	43,710,000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	172,895,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	372,449,000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	122,151,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	148,614,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	101,684,000
		GORONTALO	1,062,626,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	685,205,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	63,080,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	130,930,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	111,744,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	143,654,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	49,634,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	186,163,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	377,421,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	114,045,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	158,692,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	104,684,000
30	GUBERNUR SULAWESI BARAT	SULAWESI BARAT	1,068,304,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	662,442,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	148,220,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	97,570,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	143,063,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	37,356,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	176,233,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	405,862,000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	129,255,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	169,677,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	106,930,000
31	GUBERNUR MALUKU	MALUKU	1,380,890,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	961,512,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	190,620,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	119,738,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	157,377,000
32	GUBERNUR MALUKU UTARA	5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	61,466,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	372,311,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	419,378,000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	147,658,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	157,318,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	114,402,000
		MALUKU UTARA	1,180,142,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	780,565,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	190,620,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	117,146,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	154,608,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	55,612,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	202,579,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	399,577,000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	126,907,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		2 LAYANAN PERKANTORAN	159,986,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	112,684,000
33	GUBERNUR PAPUA	PAPUA	1,313,307,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	760,461,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	170,420,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	123,289,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	144,321,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	67,079,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	195,352,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	552,846,000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	137,673,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	175,134,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	120,678,000
		4 FASILITASI PENGEMBANGAN PROMOSI DAN KOORDINASI DI KAWASAN PERBATASAN	119,361,000
34	GUBERNUR PAPUA BARAT	PAPUA BARAT	1,376,450,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	906,893,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	146,220,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	139,370,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	183,266,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	72,065,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	305,972,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	469,557,000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	145,720,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	194,606,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	129,231,000

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


SRI HARIYATI